

ANALISIS KINERJA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAMPING DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN ASSET GAPOKTAN PUAP

Siti Sehat Tan dan Rita Indrasti

*Balai Besar Pengkaji dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jalan Tentara Pelajar No 10, Cimanggu - Bogor
E-mail: sititan2010@gmail.com*

ABSTRAK

Untuk membangun kemandirian Gapoktan PUAP maka perlu didampingi Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping. Keberadaan PMT sangat diperlukan di tingkat kabupaten untuk mengoptimalkan dan mengawasi pemanfaatan dana bantuan modal usaha yang diberikan oleh PUAP. Guna menunjang tugas dan fungsi PMT secara optimal, maka diperlukan adanya dukungan biaya operasional bagi PMT untuk melakukan tugas pendampingan dan supervisi ke lokasi penerima bantuan dana PUAP di wilayah kerjanya masing-masing. Untuk itu pengkajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana kinerja pendamping atau Penyelia Mitra Tani (PMT) dalam mengembangkan asset Gapoktan berupa modal usaha yang diberikan. Kajian dan pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei-September 2015 yaitu pengumpulan data lapang kinerja PMT 2008-2014 dengan responden PMT, Penjab PUAP di BPTP, Tim Teknis Kabupaten/Kota, penyuluh pendamping dan Gapoktan, (purposive sampling), melalui FGD dan wawancara menggunakan kuesioner, ditunjang dengan data sekunder dari instansi terkait. Data ditabulasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan dianalisis secara sederhana menggunakan excel dengan teori metode umpan balik 360 derajat (multirater feedback, multisource feedback atau multisource assessment). Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja PMT atau peran pendamping belum sesuai dengan yang diharapkan dalam menunjang pengembangan asset Gapoktan, dari nilai 1-5 (buruk-sangat baik), posisi kinerja pendamping rata-rata berada 2,9-3,4. Banyak faktor lain penyebab sebagian besar Gapoktan PUAP tidak bisa berkembang dengan baik.

Kata Kunci : Peran Pendamping, Pengelolaan, Pendampingan

PENDAHULUAN

Kehadiran PUAP dalam mendukung usaha petani, yang pengelolaannya dipercayakan kepada Gapoktan merupakan langkah strategis untuk memutus rantai birokrasi keuangan yang biasanya di pegang oleh lembaga perbankan dan memutus hubungan pinjaman bunga tinggi dari *rentenir*. Namun mampukah petani mengelola, dan mengembangkan modal yang dipercayakan kepadanya, mengingat dukungan SDM di perdesaan sangat lemah, dan *mainset* individu petani dan aparat pelaksana program di beberapa kasus yang buruk. Hasil kajian pada beberapa Gapoktan di seluruh Indonesia, umumnya terdapat pemahaman bahwa dana PUAP merupakan dana hibah yang tidak wajib untuk dikembalikan (Bustaman *et al*, 2011).

Keseragaman pola pikir masyarakat petani yang keliru tersebut memerlukan kerja keras dari pendamping, baik Penyelia Mitra Tani maupun Penyuluh pendamping program PUAP untuk memberikan pemahaman yang benar dengan berbagai metoda pendekatan yang tepat, dilakukan secara terus menerus untuk mengubah pola pikir tersebut. Penelitian

Rivai (2009) menunjukkan bahwa, Gapoktan yang terbentuk sebelum adanya PUAP memiliki kinerja yang lebih baik dari Gapoktan yang dibentuk karena adanya PUAP.

Bantuan modal yang diberikan untuk menutup kelemahan petani dalam akses kepada sumber permodalan, modal yang diberikan juga membantu dalam memperkuat kelembagaan Gapoktan yang secara umum mengalami kelemahan. Peran Gapoktan sebagai kelembagaan petani di perdesaan sangatlah strategis. Sebagai lembaga gerbang (*gateway institution*) (*institution*). Gapoktan menjadi jembatan antara petani dengan lembaga-lembaga lain diluarnya dengan fasilitator pendamping Penyelia Mitra Tani (PMT).

Gapoktan juga diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk hasil pertanian, dan termasuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani¹. Harapan petani pada kelembagaan Gapoktan cukup besar mengingat fungsi-fungsi yang diembannya dalam meningkatkan kapasitas petani sebagai pelaku utama dibidang usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan, sehingga mereka dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu perlu pendekatan yang efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka. Keefektifan peningkatan kapasitas Gapoktan merupakan tugas penting Penyelia Mitra Tani (PMT) sekaligus untuk meningkatkan nilai asset petani.

Hasil penelitian Martowijoyo (2002) melaporkan bahwa beberapa program bantuan memperlihatkan keragaan yang tidak memuaskan pada lembaga keuangan yang melaksanakan terutama pada (1) rendahnya tingkat pelunasan kredit; (2) rendahnya moralitas dibidang perkreditan aparat pelaksana; dan (3) rendahnya tingkat mobilisasi dana masyarakat. Masalah tersebut menunjukkan adanya kelemahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan ditingkat kelompok. Rendahnya SDM pengelola dan masih melekatnya pola pikir dana PUAP merupakan dana bantuan/hibah yang diberikan pemerintah sehingga tidak wajib dikembalikan. sehingga secara umum program penguatan modal bagi petani yang diharapkan dapat bergulir dan berkembang mengalami kemandegan atau mengalami kegagalan (*colaps*).

PMT juga diharapkan mampu memberikan motivasi dan inovasi dalam mengelola keuangan mikro. Disamping itu Gapoktan juga mempunyai pendamping penyuluh yang telah lama hadir dan mendampingi petani. Keduanya merupakan asset SDM yang dimiliki Gapoktan, sehingga diharapkan Gapoktan bisa memanfaatkannya. Keberhasilan program PUAP dapat ditempuh apabila seluruh komponen pendukung tersebut bekerja secara optimal dan selalu melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi secara terus menerus. Kinerja komponen tersebut akan dicirikan dengan kelembagaan Gapoktan yang profesional.

Pengembangan beberapa unit usaha Gapoktan seperti unit LKM-A, unit usaha saprotan, unit usaha pemasaran hasil, unit usaha pengolahan merupakan contoh yang banyak ditemukan dilapangan, walaupun variasi unit usahanya tidak selalu sama, tergantung kepada potensi wilayah dan ketersediaan sumberdaya manusia produktif di wilayah tersebut. Profesionalisme Gapoktan PUAP dan penetrasi biasanya selalu dilihat dari jumlah asset dan penetrasi dalam mengembangkan usaha Gapoktan, karena kedua indikator

tersebut biasanya mencerminkan SDM yang terampil dan terdidik, serta intensitas pendampingan yang terpadu.

METODOLOGI

Pengumpulan data dilakukan mulai bulan Mei 2015 – September 2015, meliputi data lapang kinerja PMT 2008-2014 dengan responden PMT, Penjab PUAP di BPTP, Tim Kabupaten/Kota, Penyuluh Pendamping dan Gapoktan, (*purposive sampling*).

Pengumpulan data primer dengan metode survei melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) (Denzin dan Lincoln, 1994). Pengumpulan data diperoleh juga melalui Penanggungjawab PUAP BPTP seluruh Indonesia yang kuesionernya dibuat oleh Tim BBP2TP. sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait ditingkat Provinsi (Dinas, Bakorluh, dan BPTP), Kabupaten (Dinas dan Bapeluh) dan Kecamatan (BPP). Responden terdiri dari; PMT, Gapoktan, Penyuluh Pendamping, Penjab PUAP BPTP, dan Tim Teknis Kab/Kota.

Indikator pemilihan responden adalah:

- PMT yang dipilih adalah PMT yang bertugas mendampingi dan membina Gapoktan (pada kabupaten terpilih)
- Penyuluh yang terpilih, merupakan petugas lapang yang mendampingi Gapoktan dalam menjalankan aktivitas usahatani maupun usaha ekonomi produktif lainnya
- Gapoktan yang terpilih, merupakan Gapoktan yang dibina dan didampingi oleh PMT sampel. Gapoktan terpilih adalah Gapoktan yang sudah maupun yang belum membentuk LKM-A.
- Tim teknis kabupaten, merupakan petugas di tingkat kabupaten terpilih.

Data dianalisis menggunakan excel dengan metode umpan balik 360 derajat (*multirater feedback, multisource feedback atau multisource assessment*), dimana penggunaan 360 derajat berarti derajat lingkaran penuh dengan karyawan berada di pusatnya. Dengan demikian umpan balik datang dari beberapa arah sekaligus, yaitu dari bawah, rekan, dan atasan. Termasuk didalamnya yaitu *assessment diri* (Pella dan Inayati, 2011).

Metode umpan balik 360 derajat telah terbukti meningkatkan beberapa hal terkait fungsi seorang pemimpin, seperti membuat perubahan positif pada sikap dan kelekatan karyawan (Atwater & Brett, 2006), dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan (Sari, 2011). Sehingga metode ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif cara mengembangkan. Dalam konteks pengkajian yang dilakukan, pengukuran penilaian kinerja PMT, dilihat melalui penilaian Gapoktan, Penjab PUAP, Penyuluh dan Tim Teknis.

Skoring terhadap hasil, diperoleh melalui wawancara menggunakan instrumen (kuesioner) terhadap responden didasarkan pada keragaan kinerja yang dilihat dari 5 (lima) aspek, yaitu (1) aspek ketrampilan, (2) aspek kesediaan berbagi ilmu, (3) aspek administrasi, (4) aspek kedisiplinan dan (5) aspek komunikasi, yang kemudian dianalisis menggunakan

sistem pemberian skor, penentuan skor tersebut menggunakan skala likert (1-5), dimana skala 5 merupakan jawaban yang paling mendukung, dan terendah adalah 1. Pengertian skala 5 yaitu adanya kesesuaian antara kondisi yang seharusnya (harapan) dengan kondisi yang terjadi (eksisting).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PUAP

PUAP adalah salah satu program Kementerian Pertanian yaitu untuk meningkatkan kemampuan modal petani dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai potensi wilayah atau spesifik lokasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah merekrut tenaga pendamping yaitu Penyelia Mitra Tani (PMT) sebagai pendamping Gapoktan di setiap lokasi PUAP. PMT yang menjadi pendamping diwajibkan memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidang keuangan mikro dan komputer. Disamping PMT, tenaga pendamping lainnya yaitu penyuluh lapang, tim pembina provinsi (Dinas pertanian, Bakorluh, dan BPTP), dan tim teknis Kabupaten (Dinas Pertanian Kabupaten dan Bapuluh).

Penyaluran dana dari pemerintah pusat untuk setiap Gapoktan/desa sebesar 100 juta diberikan berdasarkan kebijakan dan arahan dari tim pembina provinsi, tim teknis kabupaten serta hasil kesepakatan anggota Gapoktan. Pengelolaan dana dapat berupa pinjaman ke anggota dengan pembentukan Unit Usaha simpan Pinjam (USP) atau dapat pula berupa unit saprodi dan beberapa unit lainnya, yang pembayaran/pengembalian pinjaman dapat dilakukan setelah panen (yarnen) atau berdasarkan kesepakatan anggota Gapoktan. Jasa pinjaman beragam antar Gapoktan berkisar antara 1-2% per bulan. Besar pinjaman disesuaikan dengan luas lahan/usaha yang dimiliki. Pemupukan modal pada umumnya menurut kajian Bustaman *et al* (2012), setiap anggota wajib membayar satu kali iuran pokok sebesar Rp10.000-50.000 dan iuran wajib Rp5.000-10.000 pada setiap pertemuan kelompok.

Kinerja Gapoktan

Keberhasilan pendamping Penyelia Mitra Tani (PMT) dapat diukur melalui indikator keberhasilan Gapoktanbinaannya, secara rinci tahapan tersebut dapat diukur melalui:

Tahun Pertama. Dana PUAP dimanfaatkan Gapoktan untuk membiayai usaha produktif sesuai usulan anggota, yaitu melalui Rencana Usaha Anggota (RUA), Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan, RencanaUsahaBersama (RUB). Pada tahap ini peran pendamping yaitu PMT dan penyuluh sangat penting dalam memfasilitasi pembuatan RUA, RUK dan RUB.Keberhasilan pendamping pada tahap ini dapat diukur dengan melihat peruntukan pinjaman untuk usaha agribisnis produktif anggota sesuai dengan RUA.

Tahun Kedua. Pengembangan usaha menjadi unit simpan pinjam (USP) dan unit usaha lainnya dengan prinsip dasar (1) kelancaran pengembalian pinjaman dari anggota,(2) adanya simpananwajib dan pokok, (3) dukungan SDM pengurus k dalam pengelolaan dana, dan (4) peran serta pemerintah Desa dalam memfasilitasi Gapoktan. Keempat prinsip

tersebut menjadi dasar utama dalam pengembangan Gapoktan untuk membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang merupakan tujuan Gapoktan.

Tahun Ketiga, Pembentukan Unit usaha LKM-A diharapkan beriring dengan penumbuhan asset Gapoktan, melalui dana keswadayaan, kerjasama dengan pihak ketiga, kemandirian pengurus, legalitas usaha sehingga unit-unit usaha yang dikelola dapat berkembang dengan baik (Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2014). Selanjutnya dengan terbentuknya LKM-A diharapkan persoalan pembiayaan petani mikro dan buruh tani yang selama ini akses ke modal keuangan formal cukup sulit dapat teratasi.

Keragaan Kelembagaan Gapoktan

Kegiatan PUAP yang dimulai tahun 2008 dan selama 7 tahun (2008 – 2013) sudah mencapai 49.186 gabungan kelompok tani (Gapoktan), yang tersebar di 427 kabupaten, dan 33 provinsi dengan jumlah dana yang telah disalurkan sebesar Rp.4,9 triliun (Kemtan 2013). Pada tahun 2015 penambahan sebanyak 4.000 Gapoktan. Hasil evaluasi yang dilakukan sampai dengan tahun 2014, dari 31.527 sampel Gapoktan baru 3.898 Gapoktan (12,4%) yang telah berhasil membentuk LKM-A (Tabel 1) , sedang sisanya sebanyak 27.629 Gapoktan (87,6%) masih dalam bentuk USP (Tabel 2).

Tabel 1. Keragaan pembentukan lembaga keuangan mikro agribisnis pada Gapoktan PUAP 2008-2013

Wilayah	Jumlah Provinsi	Jumlah Gapoktan	Jumlah LKM-A (Unit)	%
Sumatera	10	9.446	1.427	36,61
Jawa	6	10.161	1.625	41,69
Bali dan Nusa Tenggara	3	2.760	135	3,46
Kalimantan	4	2.693	159	4,08
Sulawesi	6	4.160	441	11,31
Maluku dan Papua	4	2.307	111	2,85
Jumlah	33	31.527	3.898	100

Sumber: BBP2TP dan Direktorat Pembiayaan Pertanian (2014)

Tabel 2. Keragaan unit usaha simpan pinjam (USP) pada Gapoktan PUAP 2008-2013

Wilayah	Jumlah Provinsi	Jumlah Gapoktan	Jumlah USP (Unit)	%
Sumatera	10	9.446	8.019	29,02
Jawa	6	10.161	8.536	30,90
Bali dan Nusa Tenggara	3	2.760	2.625	9,50
Kalimantan	4	2.693	2.534	9,17
Sulawesi	6	4.160	3.719	13,46
Maluku dan Papua	4	2.307	2.196	7,95
Jumlah	33	31.527	27.629	100

Sumber: BBP2TP dan Direktorat Pembiayaan Pertanian (2014)

LKM-A terbanyak berada pada daerah Jawa, kemudian Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta terakhir adalah Papua dan Maluku. Hasil evaluasi Gapoktan PUAP 2008-2011 di Banten, menunjukkan bahwa dari 802 contoh Gapoktan yang dianalisis, nilai asset hanya berkembang dari Rp80.200 juta menjadi Rp83.683. LKM-A yang terbentuk baru

46 dan USP 756. Kenaikan nilai asset yang tidak signifikan hampir terjadi di setiap provinsi dan sebagian besar masih berada pada grade D dan E (Tabel 3). Penetapan grade dilakukan mengacu pada suku bunga Bank dan bunga pinjaman ke anggota yang berkisar dari 1-1,5% per bulan. Perkembangan kelembagaan Gapoktan sangat lambat dan cenderung tidak berkembang terutama pada wilayah Maluku dan Papua.

Tabel 3. Keragaan lembaga keuangan mikro agribisnis berbasis katagori 2008-2013

Wilayah	Jumlah Provinsi	Katagori					
		A	B	C	D	E	Jlh
Sumatera	10	121	20	17	16	1253	1.427
Jawa	6	265	61	84	128	1087	1.625
Bali dan Nusa Tenggara	3	12	2	2	1	118	135
Kalimantan	4	17	1	4	2	135	159
Sulawesi	6	3	0	1	5	432	441
Maluku dan Papua	4	20	7	7	3	74	111
Jumlah	33	438	91	115	155	3100	3898
%		11,23	2,33	2,95	3,98	79,51	100

Sumber: Data primer diolah

A= sangat baik, B= Baik, C= Cukup, D= Kurang Baik dan E= Buruk

Kinerja Pendamping Dalam Pengembangan Nilai Asset Gapoktan

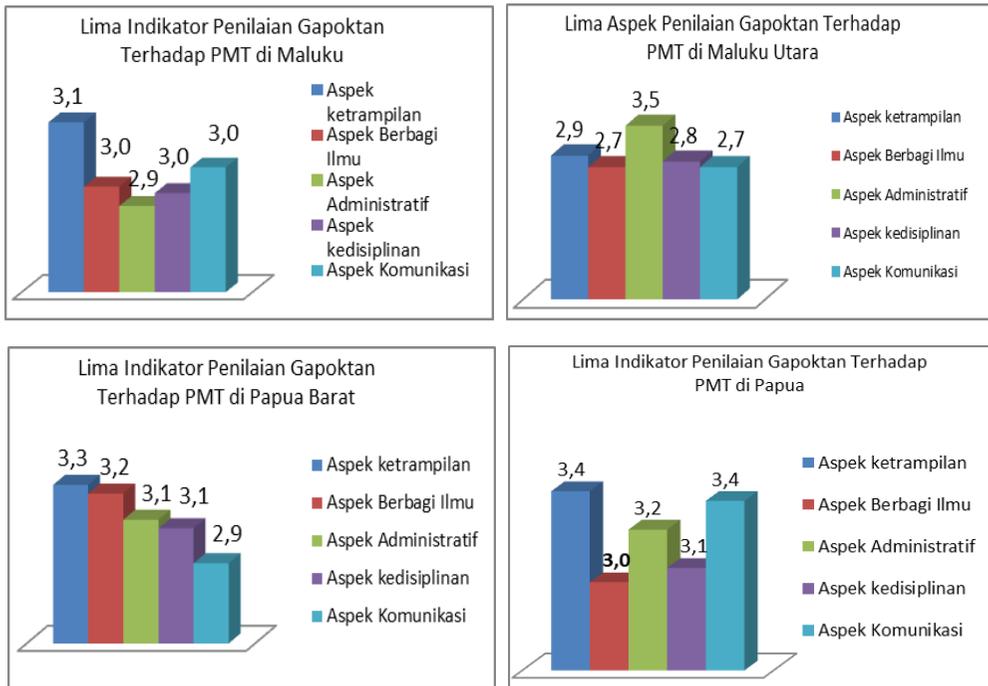
Pendamping PUAP merupakan salah satu komponen pendukung pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bertugas untuk membangun kapasitas Gapoktan sebagai kelembagaan tani. Sesuai dengan struktur dasar PUAP, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh diharapkan dapat: a) Membantu merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP di Kabupaten/Kota sebagai jabaran kebijakan Pusat dan Provinsi; b) Bersama dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi awal rencana usaha bersama (RUB) Gapoktan; dan c) Melaporkan perkembangan PUAP secara periodik kepada Kementerian Pertanian.

Pendamping PUAP diharapkan juga mampu berperan sebagai fasilitator untuk mengembangkan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani, buruh tani dan rumah tangga tani di perdesaan sekaligus dapat memfasilitasi penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Keberhasilan Pendamping PUAP sebagai fasilitator dalam pengembangan usaha agribisnis dan penumbuhan Gapoktan sangat ditentukan oleh koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam PUAP di Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Petunjuk Teknis Pendamping PUAP ini, dapat dijadikan acuan bagi Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh maupun pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan PUAP. Peran fasilitator dalam mendorong partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan program. Untuk mendorong keberlanjutan kegiatan diperlukan *exit strategy* (Sudaryanto dan Rusastra, 2006)

Hasil analisis kinerja pendamping penyelia mitra tani yang dilakukan pada beberapa Provinsi, hampir seluruhnya memiliki kemiripan dalam efektivitas kinerja pendamping.

Analisis yang dilakukan mencakup beberapa aspek, yaitu (1) aspek ketrampilan, (2) aspek kesediaan berbagi ilmu, (3) aspek administrasi, (4) aspek kedisiplinan dan (5) aspek komunikasi, yang kemudian dianalisis menggunakan sistem pemberian skor, penentuan skor tersebut menggunakan skala likert (1-5), dimana skala 5 merupakan jawaban yang paling mendukung, dan terendah adalah 1. Pengertian skala 5 yaitu adanya kesesuaian antara kondisi yang seharusnya (harapan) dengan kondisi yang terjadi (eksisting) (Gambar 1-4).



Gambar 1-4. Rata-Rata Skor Lima Aspek Penilaian Gapoktan Terhadap Pendamping Penyelia Mitra Tani

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa, kinerja pendamping dalam menjalankan tugas dan fungsinya rata-rata cukup (2,9-3,4), kecuali di Maluku Utara rata-rata skor penilaian masih kurang (2,7-2,9). Rendahnya kinerja pendamping disebabkan berbagai faktor eksternal maupun internal berupa kebijakan pemerintah pusat dalam biaya operasional, dukungan pemerintah daerah dan internal Gapoktan yang tidak mendukung. Namun demikian dari hasil analisis terhadap jawaban PMT, masalah utama dalam pembinaan dan pengembangan Gapoktan adalah biaya operasional rendah dengan daerah binaan yang cukup luas, tidak memungkinkan PMT untuk menjangkanya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pendamping

Selama tahun 2008-2014 kebijakan pemerintah pusat tentang daerah binaan Gapoktan oleh PMT yaitu 20-30 Gapoktan yang tersebar di beberapa Desa dalam satu kabupaten. Hal tersebut kemudian menjadi kendala terutama pada daerah-daerah yang secara geografis memiliki wilayah kerja yang jauh dan sulit dijangkau atau memerlukan biaya

transportasi yang cukup besar. Kebijakan menyamaratakan dana operasional diseluruh provinsi menjadi masalah utama untuk daerah-daerah tersebut. Kasus yang dijumpai di provinsi yang penilaian terhadap pendampingnya baik, seperti di Jawa dan Sumatera disebabkan karena PMT dan penyuluh lebih intensif, transportasi lebih mudah dan murah dibandingkan dengan wilayah lainnya, terutama wilayah Tengah an Timur Indonesia.

Jangkauan kerja PMT di daerah Maluku dan Papua umumnya sangat berat, karena lokasi berada pada jarak yang berjauhan, dimana satu PMT mendampingi 15-20 Gapoktan yang tersebar di beberapa Pulau-pulau kecil yang cukup sulit dijangkau dan memerlukan biaya transportasi yang cukup mahal. dengan biaya operasional (BOP) 1,2 juta dengan wilayah binaan yang luas dimana sekali jalan bisa menghabiskan biaya Rp50.000, bila pembinaan dilakukan sebulan sekali maka, idealnya hanya 5 Gapoktan yang bisa didampingi dan dibina selama 5 bulan. Kondisi demikian menyebabkan banyak Gapoktan yang hanya sekali dalam setahun dikunjungi oleh PMT. Variasi tingkat keberhasilan Gapoktan sulit untuk diukur melalui kinerja PMT, karena dari Gapoktan-Gapoktan yang dibina, ada yang dikatagorikan baik, namun ada juga yang sangat buruk. Banyak faktor berperan dalam keberhasilan suatu Gapoktan, diantara yaitu; peran perangkat desa dalam mendukung, baik dukungan modal tambahan, sarana dan prasarana, maupun sanksi-sanksi sosial yang diatur dan disepakati bersama

Kurang berhasilnya Gapoktan dalam pengembangan asset dapat dilihat juga dari kenaikan nilai asset yang tidak signifikan dan persentase LKM-A yang kecil. Salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat pembentukan LKM-A adalah permasalahan biaya yang dihadapi Gapoktan untuk mendapatkan legalisasi. Untuk itu perlu dipertimbangkan bantuan pembiayaan untuk proses legalisasi agar Gapoktan memiliki Badan Hukum.

Faktor lain selain peran pendamping adalah kemampuan pengurus Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola modal usaha, adanya persepsi dari anggota bahwa pinjaman dana PUAP tidak perlu dikembalikan, serta dana pinjaman tidak digunakan sesuai kebutuhan usaha. Menurut Suprpto (2012), pada tahap awal seleksi dan verifikasi calon penerima dana PUAP tidak memperhatikan kelayakan usaha. Pembinaan dan pendampingan dari tim pembina dan tim teknis kurang intensif.

Dengan demikian perlu langkah peningkatan kinerja Pendamping Penyelia Mitra Tani (PMT) melalui (a) peningkatan budaya kerja, (b) memperkecil rasio antara PMT dengan wilayah binaan, (c) perbaikan kerjasama antara PMT dengan penyuluh pendamping (PP),serta Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan (d) perlu adanya penyegaran baru untuk PMT lama melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kepentingan atau keperluan Gapoktan dan perkembangan ilmu pengetahuan..

KESIMPULAN

Bantuan modal Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sangat penting dalam peningkatan produktifitas petani untuk penyediaan modal kerja usaha dan dana pendampingan. Pengembangan Gapoktan dan peningkatan nilai asset Gapoktan ditentukan melalui pendampingan yang padu, latar belakang pembentukan Gapoktan dan SDM

pengelola dana. Setelah 7 tahun berjalan, hasil evaluasi menunjukkan kinerja pendamping pada beberapa provinsi Indonesia masih jauh dari yang diharapkan yaitu berada pada kisaran 2,7-3,4 dari nilai 4 dan 5 yang diharapkan, dan perkembangan nilai asset yang sebagian besar masih di grade D dan E. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu pendamping yaitu dana biaya operasional (BOP) yang tidak sesuai dengan besarnya wilayah binaan, disamping faktor internal gapoktan dalam pengelolaan dana PUAP, kelayakan usaha dan persepsi anggota tentang dana PUAP yang dianggap merupakan dana hibah atau bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atwater, L; dan Brett, J. 2006. 360 degree feedback to managers: Does it result in changes in employee attitudes, *Group and Organization Management*, 31, 578-600.
- BBP2TP dan Direktorat Pembiayaan Pertanian. 2014. Data base Gapoktan PUAP 2008-2011. Kerja sama BBP2TP Kementerian Pertanian.
- Bustaman, S; S.S. Tan; A. Supriatna; Wasito, dan Erythrina. 2012. Eskalasi pengembangan inovasi pertanian pada usaha bersama Gapoktan PUAP 2008-2011. Laporan hasil penelitian PUAP. Bogor: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Bustaman, S; S.S. Tan; D.M. Arsyad; Wasito, dan M. Mardiharini. 2011. Kelembagaan Formal dan Informal dalam pengembangan inovasi spesifik lokasi untuk mendukung pembangunan pertanian di Jawa dan luar Jawa. Laporan hasil penelitian Program Insentif Peningkatan Kemampuan Peneliti dan Perekayasa. Kementerian Riset dan Teknologi- Balai Besra Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.
- Direktorat Pembiayaan Pertanian, 2014. Laporan penyaluran dana PUAP 2008-2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana dan SaranaPertanian, Kementerian Pertanian.
- Denzim, Norman K., and Lincoln, Yvonna S.(Editor). 1994. *Handbook of qualitative research*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
- Kementerian Pertanian, 2013. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2013. Jakarta: Kementerian Pertanian. 40 hal.
- Martowijoyo, S. 2002. Dampak pemberlakuan sistem bank perkreditan rakyat terhadap kinerja lembaga perdesaan. *Jurnal ekonomi rakyat*, tahun I, No 5, Juli 2002.
- Pella, D.A; dan Inayati, A. 2011. *Talent Management: Mengembangkan SDM untuk mencapai pertumbuhan dan kinerja prima*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rivai, R. 2009. Penentuan lokasi dan evaluasi kinerja serta dampak awal PUAP. Seminar Hasil Penelitian TA 2009: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Suprpto . A. 2012. Pokok-pokok bahasan terhadap pelaksanaan PUAP. Makalah disampaikan pada workshop PUAP, Bogor, 8 Agustus 2012.

Sari, I.K. 2011. Pengaruh metode umpan balik kepemimpinan transformasional 360 derajat terhadap peningkatan kepuasan kerja karyawan. Tesis (tidak dipublikasikan). Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Sudaryanto, T. Dan IW. Rusastra, 2006. Kebijakan strstegis usaha pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan pengentasan kemiskinan: 115-122.